



Pengaruh Filsafat Konfusianisme dalam Perubahan Kebijakan Luar Negeri Tiongkok Terhadap Isu Denuklirisasi Korea Utara

Rachmat Hidayatullah, Mohamad Rosyidin, Marten Hanura

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research provides to explain why did the Chinese Government change his foreign policy to become more active towards North Korean denuclearization issue. This research also aims to describe the construction of Chinese foreign policy based on his inside factors to explain the direction of Chinese foreign policy itself toward North Korean denuclearization. This research is using Constructivism Theory with Congruent Method to analyze how Confucianism norms as an ancient Chinese philosophy can be influence on Chinese foreign policy toward this issue. The result of this research show that the influence of Confucianism norms had been constructed to the China identity as peace-loving country. In addition, the changing of Chinese foreign policy itself had been seen as a positive image towards peace by the international community. The positive image can be used to bargain his position into international community. Based on that result, the changing of Chinese foreign policy can be seen from a different point of view which is non-Grand IR theories and also recommend especially for Indonesia Government to build a national image to show Indonesian values and norm.

Keywords: *Chinese Government; Foreign Policy; North Korea; Denuclearization, Confucianism*

PENDAHULUAN

Tiongkok dan Korea Utara memiliki hubungan aliansi yang cukup dekat, terutama pada saat pasca perang dingin di mana kedua negara tersebut memiliki kerja sama bilateral aliansi yang dinamakan *The Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance* pada tahun 1961. Identitas aliansi tersebut seharusnya memberikan kewajiban kedua negara tersebut untuk saling melindungi khususnya dalam kancah komunitas internasional (Nam, 2010, hal. 13). Namun, dimulai pada tahun 2013 pasca uji coba nuklir ketiga Korea Utara, Tiongkok mulai mengubah kebijakan luar negerinya dengan mendukung penetapan sanksi ekonomi DK-PBB kepada Korea Utara. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah Tiongkok yang mulai mengimplementasikan resolusi-resolusi yang ditetapkan oleh DK-PBB kepada Korea Utara seperti pemerintah

Tiongkok melakukan publikasi mengenai pelarangan bepergian (*travel ban*) terhadap beberapa warga negara Korea Utara ke negaranya, pemerintah Tiongkok melalui Kementerian Perdagangan melakukan publikasi 236 lembar dokumen barang-barang ekspor Korea Utara yang diduga digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir, lalu pemerintah Tiongkok juga melakukan embargo bahan bakar minyak pada tahun 2017 yang mengakibatkan harga minyak di Korea Utara meningkat dari 8.000 won menjadi 14.000 won per liternya (mata uang Korea Utara) (RFA, 2013; New York Times, 2013; UNSCR, 2015; UNSCR, 2019; Silberstein 2019).

Hal tersebut berbanding terbalik dengan perilaku pemerintah Tiongkok kepada Korea Utara dalam periode sebelumnya di mana Tiongkok menolak pemeriksaan kargo ekspor ke Korea Utara pada tahun 2006 pasca uji coba nuklir pertama Korea Utara. Tindakan tersebut dapat dikatakan merupakan tindakan yang melanggar resolusi DK PBB nomor 1718 (2006) pada *article* 10 (UNSCR, 2006). Lalu, pemerintah Tiongkok didapati sering kali memberikan bantuan ekonomi secara masif kepada Korea Utara yang dianggap menghambat keberlangsungan dari implementasi sanksi ekonomi DK-PBB dalam mencapai proses denuklirisasi Korea Utara (Lee, 2014, hal. 104-107). Perbedaan sikap Tiongkok pula di tunjukan pada saat uji coba rudal nuklir pemerintah India pada tahun 1998 di mana pada saat itu pemerintah Tiongkok memberikan protes keras kepada pemerintah India dengan menyatakan "*China grave concern over the test which were detrimental to peace and stability in South Asian Region*" (Garver, 2001, hal. 3-24). Seharusnya, Tiongkok sebagai negara aliansi Korea Utara tetap konsisten dengan melakukan penolakan sanksi ekonomi DK-PBB dan pemerintah Tiongkok dapat menggunakan hak vetonya untuk tidak mendukung sanksi ekonomi tersebut.

Merujuk dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yakni "*Mengapa pemerintah Tiongkok mendukung penetapan sanksi ekonomi DK-PBB kepada Korea Utara dalam isu denuklirisasi?*". Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu hubungan internasional mengenai kebijakan luar negeri Tiongkok. Secara praktis, penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi pemerintah Indonesia dalam melihat perkembangan kebijakan luar negeri Tiongkok.

Beberapa penelitian mengenai topik ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Joo Young Song dengan judul penelitian '*Understanding China's Respones to North Korea's Provocations: The Dual Threats Model*' hanya menjelaskan pola-pola perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok dalam isu denuklirisasi di mana penelitian ini berargumen bahwa perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok tersebut dipengaruhi atas rasa terancamnya Tiongkok terhadap Korea Utara khususnya secara pertahanan dan keamanan wilayah regional Asia Timur dan Asia Pasifik (Song, 2011, hal. 1154). Dalam hal ini penelitian ini hanya melihat faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok sehingga penelitian ini belum menjelaskan mengenai faktor internal Tiongkok yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negerinya terkait isu tersebut.

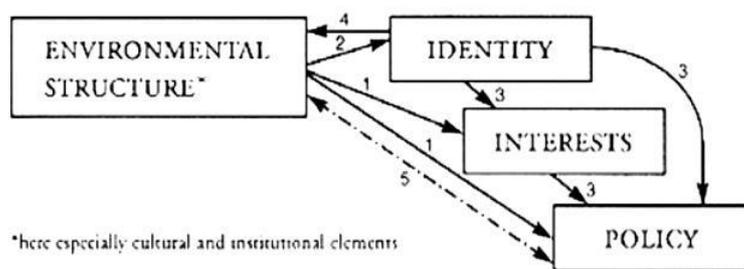
Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Bruce W. Bennett dengan judul '*Implications of China's Economic Penetration of North Korea?*' di mana penelitian menjelaskan mengenai bagaimana pengaruh implementasi resolusi DK-PBB yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap Korea Utara. Secara garis besar, penelitian menjelaskan upaya-upaya pemerintah Tiongkok dalam mengimplementasikan dan merealisasikan resolusi DK-PBB (Bennett, 2016, hal. 275). Namun, penelitian ini secara khusus tidak menjelaskan mengenai alasan mengapa pemerintah Tiongkok mendukung penetapan sanksi ekonomi resolusi DK-PBB terhadap Korea Utara tersebut.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Victoria-Charlotte Browning dan Dr. Stefan Friedrich dengan judul *'The United Nations and North Korea: A Balancing Act Between Sanction and Humanitarian Assistance'* di mana penelitian ini menjelaskan keefektifan sanksi ekonomi yang ditetapkan oleh DK-PBB kepada Korea Utara dalam hal ini argumentasi utama dari penelitian ini adalah pemerintah Tiongkok dan Rusia memiliki peran penting dalam menunjang keefektifan sanksi ekonomi tersebut (Browning dan Friedrich, 2017, hal. 10-11). Namun, penelitian ini juga tidak menjelaskan penyebab dari perubahan sikap Tiongkok sebagai negara aliansi Korea Utara dengan mengimplementasikan sanksi ekonomi tersebut.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah di jelaskan di atas, maka penelitian ini akan memfokuskan pada faktor internal pemerintah Tiongkok yang mempengaruhi kebijakan luar negerinya kepada Korea Utara khususnya dalam isu denuklirisasi. Maka dari itu penelitian ini akan menggunakan teori hubungan internasional yakni konstruktivisme di mana konstruktivisme percaya bahwa faktor-faktor ideasional atau normatif seperti budaya, norma, kepercayaan, bahasa, gagasan dan faktor non-materil lainnya merupakan hal yang penting dalam pembentukan struktur sosial (Burchill, 2005, hal. 196). Norma sendiri di definisikan sebagai *'collective expectation for the proper behavior of actors with a given identity'* (Katzenstein, 1996, hal. 3). Dalam hal ini norma dapat diartikan sebagai suatu persepsi aktor dalam melakukan suatu tindakan dengan identitas yang dimiliki oleh aktor tersebut. Sifat norma sendiri menyediakan suatu kerangka mengenai apa yang harus dilakukan dan tidak perlu dilakukan oleh suatu aktor sehingga dapat disimpulkan norma sendiri memiliki sifat yang regulatif dalam menentukan standar perilaku suatu aktor melalui identitas yang dimilikinya.

Pembentukan kebijakan luar negeri melalui pandangan konstruktivisme dapat diperjelas melalui gambar di bawah ini:

Gambar 1. Gambaran Operasional Konstruktivisme



Sumber: Jepperson, Wendt, dan Katzenstein, 1996

Dari gambar di atas dapat diketahui terdapat lima pola hubungan di antara norma, identitas, kepentingan dan kebijakan (tindakan suatu negara). Yang pertama (No.1), suatu struktur normatif atau norma akan membentuk kepentingan ataupun langsung membentuk suatu kebijakan. Yang kedua (No.2), norma akan membentuk suatu identitas aktor. Yang ketiga (No.3), identitas akan membentuk kepentingan lalu akan mempengaruhi kebijakan atau identitas secara langsung dapat mempengaruhi kebijakan. Yang keempat (No.4), suatu identitas akan membentuk norma. Lalu yang terakhir (No.5), norma dan kebijakan memiliki hubungan yang saling berkaitan. Dalam hal ini norma akan

membentuk kebijakan, lalu kebijakan ini dapat mempengaruhi norma tersebut (mengubah atau memperkuat) (Rosyidin, 2012, hal. 139).

Salah satu norma yang dimiliki oleh negara Tiongkok yakni norma yang berasal dari ajaran filsafat Konfusianisme. Konfusianisme merupakan filsafat kuno Tiongkok yang dikemukakan oleh Kongzi dan dikembangkan oleh Mencius (murid Kongzi) pada tahun 220 hingga 260 SM pada masa kekaisaran dinasti Han. Konfusianisme mengajarkan nilai dan norma masyarakat Tiongkok dalam bertindak (McArthur, 2011, hal. 47). Di dalam kebijakan luar negeri Tiongkok, pengaruh Konfusianisme dapat dilihat melalui empat elemen penting seperti yang dijelaskan oleh Qin Yaqing (2012) yakni di antaranya *contextuality*, *correlativity*, *complementarity*, dan *changeability* yang akan dijabarkan sebagai berikut: (1) **Contextuality** merupakan penyesuaian diri dengan lingkungan. *Contextuality* merupakan konsep dari nilai *shi*. Yang diartikan bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh kekuasaan yang berada di lingkungan internasional. (2) **Correlativity** di dalam suatu kebijakan luar negeri dapat memiliki makna untuk mencari harga diri atau mendapatkan pengakuan dari negara lain (*mianzi*). Hal ini merupakan suatu hubungan timbal balik dari tindakan yang dilakukan oleh aktor melalui hubungan kerja sama multilateral maupun bilateral (*guanxi*). (3) **Complementarity** diartikan sebagai saling melengkapi satu sama lain (*yi ching*) konsep ini merupakan cerminan dari simbol yin-yang. Hal ini juga dapat diartikan bahwa setiap negara memiliki peran yang penting dan setiap halnya memiliki sifat saling melengkapi satu sama lain. Dalam kehidupan sosial dapat diartikan juga bahwa aktor mengakui adanya konflik dan harmoni (*he*). Dalam hal ini harmoni akan tercipta ketika adanya konflik dan konflik tersebut akan terselesaikan jika rasa saling melengkapi satu sama lain dapat tercipta. (3) **Changeability** dapat diartikan kebijakan luar negeri Tiongkok akan mengalami perubahan secara terus menerus (*bian*)

Konfusianisme juga memandang komunitas internasional seperti *'agora without polis or a talking shop without a teeth'* dalam artian komunitas atau norma internasional memerlukan justifikasi dari setiap anggotanya (Babones, 2016). Justifikasi tersebut dapat dikatakan sebagai suatu komitmen negara (aktor) dalam melakukan tindakan dengan mengimplementasikan keputusan dari komunitas internasional maupun norma-norma internasional lainnya. Dalam hal ini dapat dikatakan suatu patuh terhadap aturan yang telah disepakatinya. Konfusianisme juga percaya bahwa tatanan sosial yang ideal *ketika 'the world share in common by all'* yang dapat diartikan bahwa tatanan sosial yang ideal ketika setiap manusia memiliki nasib yang sama untuk memiliki kehidupan yang damai hal ini memiliki sifat yang diistilahkan sebagai *all-under-heaven (tian xia wei gong)* yang dapat diartikan bahwa kehidupan yang damai merupakan tanggung jawab setiap manusia sehingga esensi dari segalanya adalah untuk mengejar suatu kehidupan yang 'harmoni' (Da Tong) seraya mengejar kepentingan-kepentingan lainnya (Bell, 2010, hal. 40-41).

Dengan demikian, perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok kepada Korea Utara dalam isu denuklirisasi dapat dipandang melalui norma Konfusianisme yang merupakan norma negara Tiongkok bahwasanya norma Konfusianisme yang mengedepankan harmoni atau perdamaian dunia di mana hal tersebut mempengaruhi pembentukan identitas Tiongkok yang terimplementasikan ke dalam suatu tindakan pemerintah Tiongkok dengan mengubah kebijakan luar negerinya terhadap Korea Utara khususnya dalam isu denuklirisasi.

Penelitian ini bersifat kualitatif eksplanatif yang digunakan untuk menjelaskan kontradiksi dalam suatu fenomena di antara variabel dependen dan variabel independen. Untuk memahami perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap Korea Utara dalam

isu denuklirisasi, penelitian ini menggunakan paradigma interpretif agar dapat memahami tindakan dari subjek penelitian sehingga dapat ditemukan konstruksi serta makna dari tindakan tersebut. (Neuman, 2014. Hal. 103-479). Subjek penelitian ini adalah pemerintah Tiongkok pada tahun 2013 hingga 2018 yakni Xi Jinping. Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu studi Pustaka yang berupa data sekunder seperti *website*, buku-buku, laporan, artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam menganalisis dan menginterpretasikan data, penelitian ini menggunakan metode analisis kongruen yang digunakan untuk membuktikan suatu teori pada fenomena atau kasus penelitian sehingga dapat diketahui mengenai penjelasan atau prediksi dari hasil penelitian (George dan Bennett, 2005, hal. 226).

PEMBAHASAN

Sikap Tiongkok kepada Korea Utara dalam isu denuklirisasi dapat dilihat melalui pernyataan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pada saat itu yang menyatakan:

“...As a permanent member of the UN Security Council, China has never forgotten its international responsibilities and obligations, and has taken an active part in addressing major regional and international issues... We have worked together with other parties to ease tension on the Korean Peninsula, actively pushed for a resumption of the Six-Party Talks...”
(FMPRC, 2013).

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa Tiongkok mendukung adanya denuklirisasi Korea Utara dan menyetujui resolusi-resolusi sanksi ekonomi DK-PBB kepada Korea Utara. Sikap Tiongkok tersebut pula dapat dilihat melalui *White Paper* yang di publikasikan oleh pemerintah Tiongkok. Hal tersebut berisikan sebagai berikut:

“...China’s position on the Korean Peninsula nuclear issue is consistent and clear-cut. China is committed to the denuclearization of the peninsula, its peace and stability, and settlement of the issue through dialogue and consultation. Over the years, China has made tremendous efforts to facilitate the process of denuclearization of the peninsula, safeguard the overall peace and stability there, and realize an early resumption of the Six-Party Talks. China has made clear its opposition to such actions and supported the relevant Security Council resolutions to prevent the DPRK’s further pursuit of nuclear weapons. China will continue to work with the international community and strive for denuclearization and long-term peace and stability of the peninsula and of Northeast Asia as a whole...” (SCPRC, 2017, cetak tebal ditambahkan).

Sikap Tiongkok tersebut dapat dikatakan memiliki kontradiksi dengan identitas aliansi yang dimiliki oleh Tiongkok bersama Korea Utara seharusnya Tiongkok dapat bersifat menolak adanya denuklirisasi Korea Utara. Dukungan Tiongkok terhadap terciptanya denuklirisasi ini pula dapat dimaknai sebagai upaya Tiongkok untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian khususnya di wilayah regional Asia seperti halnya Konfusianisme yang percaya bahwa esensi dari segala adanya untuk mencapai *harmoni* dimana tanggung jawab tersebut terimplikasi ke dalam kebijakan luar negeri Tiongkok yang dapat dilihat melalui *white paper* diatas.

Lalu, sikap Tiongkok yang mendukung denuklirisasi Korea Utara pula memiliki kesamaan dengan negara rivalitasnya yakni Amerika Serikat dan sikap Tiongkok memberikan dukungan kepada rivalitasnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui hasil pertemuan kerja sama *US-China Strategic Security Dialogue* yakni:

“...The United States welcomes a strong, prosperous and stable China that plays a greater role in international and regional affairs. The United States supports China's stability and reform. China respects the traditional influence and practical interests of the United States in the Asia-Pacific and welcomes the United States to continue to play a positive and constructive role in regional affairs....” (FMPRC, 2015).

Dari hal diatas dapat dilihat bahwa Tiongkok merubah sikapnya pula dengan mendukung Amerika Serikat yang merupakan rivalnya untuk mencapai denuklirisasi di Korea Utara. Tindakan ini dapat ditafsirkan dalam nilai ajaran Konfusianisme yang menyatakan *“a single sound is nothing to hear, a single color does not make a pattern, a single taste does not satisfy the stomach and single item does not harmonize”* yang dapat pula bahwa untuk mencapai suatu harmoni setiap pihak harus saling mempromosikan (*mutually promoting*), saling melengkapi (*mutually complementing*), dan saling menjaga (*mutually stabilizing way*) (Li, 2006, hal. 584).

Dukungan Tiongkok dalam terciptanya denuklirisasi pula dapat dipertegas kembali melalui pertemuan *China-US Strategic Security Dialogue* pada periode berikutnya yang menyatakan:

“...The two sides reaffirm their commitment to achieving the goal of complete, verifiable, and irreversible denuclearization and maintaining peace and stability on the Korean Peninsula. The United States and China reaffirmed the goals enshrined in the DPRK-related UNSC resolutions...” (FMPRC, 2017).

Dari hal diatas dapat dimaknai bahwa Tiongkok mengesampingkan identitas rivalnya dengan Amerika Serikat dan identitas aliansi nya dengan Korea Utara hal ini ditujukan untuk mencapai denuklirisasi Korea Utara. Seperti halnya yang dikatakan oleh Konfusius *“The junzi harmonizes but does not seek sameness, whereas the petty person seeks sameness but does not harmonize”* (君子和而不同, 小人同而不和) (Analects 13.23 dalam Li, 2006, hal. 584). Bahwasanya, Konfusianisme percaya suatu harmoni akan tercipta atas adanya perbedaan bukan persamaan hal tersebut yang dilakukan oleh Tiongkok untuk mendukung tercipta proses denuklirisasi Korea Utara.

Selanjutnya, dukungan Tiongkok atas terciptanya denuklirisasi Korea Utara pula dapat dilihat melalui pidato Xi Jinping untuk melakukan agenda diplomatik dengan Korea Utara di Dalian pada tahun 2018 yang menyatakan:

“...I am willing to hold the meeting with Comrade Chairman again to make joint efforts to push the healthy and stable development of China-DPRK relations, realize lasting peace and stability on the Korean Peninsula, and promote regional peace, stability and prosperity...” (FMPRC, 2018).

Dari pidato tersebut dapat diketahui bahwa Tiongkok berupaya mengakomodir Korea Utara untuk menyelesaikan isu denuklirisasi melalui jalur-jalur damai dengan dialog sehingga dapat tercipta *win-win solution* dari penyelesaian isu ini. Seperti halnya yang diajarkan oleh Konfusianis bahwa *“To harmonize with others by goodness is being reasonably accommodating (以善和人者謂之順) and to harmonize with others by wickedness is fawning” (以不善和人者謂之諛)* (Li, 2006, hal. 587). Hal ini dilakukan

untuk mengejar *shared in common future for mankind* atau yang terkonsep dalam *Tianxia* yang dapat dimaknai bahwa setiap pihak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang damai (Bell, 2010, hal. 43).

Dukungan-dukungan Tiongkok untuk menciptakan denuklirisasi Korea Utara pula dapat dilihat melalui implementasi kebijakan yang merupakan respon dari resolusi-resolusi DK-PBB seperti pada tahun 2013 pemerintah Tiongkok melakukan publikasi mengenai pelarangan bepergian (*travel ban*) beberapa warga negara Korea Utara ke negaranya seperti yang tercantum dalam *Annex I* resolusi 2087 pada tanggal 1 April 2013 (RFA, 2013). Lalu, pasca pemberlakuan resolusi nomor 2094 tahun 2013, pemerintah Tiongkok melakukan inspeksi kargo barang-barang ekspor ke Korea Utara bersama DK-PBB sesuai dengan *article 35* dalam resolusi 2094 pada tanggal 1 April 2013 (Blanchard, 2013; UNSCR, 2014). Pemerintah Tiongkok juga melakukan pembekuan aset bank milik Korea Utara dimulai pada tanggal 8 Mei 2013 sesuai dengan yang tercantum dalam *Annex II* resolusi nomor 2087 dan 2094 (Rabinovitch, 2013; UNSCR 2015). Hal tersebut dilakukan Tiongkok melalui Kementerian Perdagangan Tiongkok kepada *People's Bank of China, Public Security, Customs Administration, dan Border Guards* (Lee, 2014, hal 107). Tidak hanya hal tersebut, di tahun yang sama pemerintah Tiongkok melakukan publikasi mengenai kebijakan pelarangan barang-barang ekspor ke Korea Utara sesuai seperti yang tercantum dalam *Annex III* dan *IV* pada tanggal 23 September 2013 (BBC, 2013). Kurang lebih sekitar 236 lembar dokumen mengenai pelarangan barang-barang ekspor Tiongkok kepada Korea Utara yang dipublikasikan melalui Kementerian Perdagangan Tiongkok, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, Administrasi Umum Pajak dan Otoritas Energi Atom (New York Times, 2013; UNSCR, 2015).

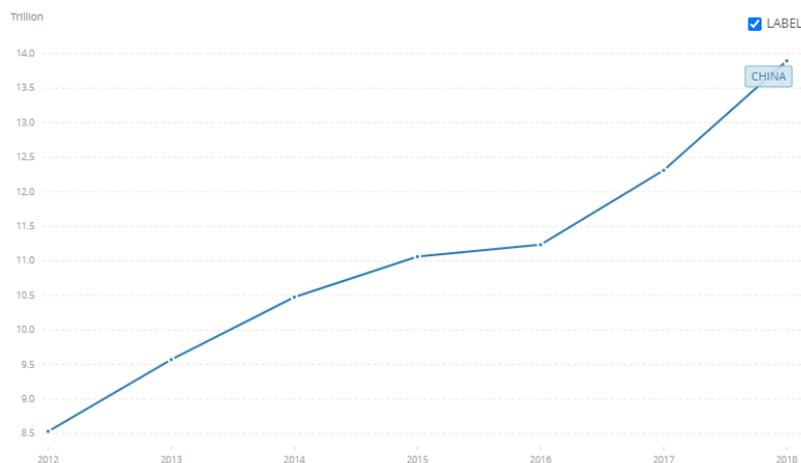
Lalu, pasca pemberlakuan resolusi DK-PBB nomor 2270 dan 2321 tahun 2016, pemerintah Tiongkok melaporkan kepada DK-PBB dan membekukan aset luar negeri Tiongkok di cabang *People's Bank of China* di Singapura (*Chinpo's*) pada tanggal 7 Maret 2016 sesuai yang tercantum dalam *Article 48* dan *Annex II* dalam resolusi tersebut (Lynch, 2016; UNSCR, 2017). Lalu, pemerintah Tiongkok kembali melakukan pelarangan ekspor barang-barang yang diduga digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir ke Korea Utara di mulai pada tanggal 5 April 2016 (BBC, 2016; UNSCR, 2017). Lalu, Kementerian Perdagangan Tiongkok mempublikasikan mengenai pelarangan ekspor barang-barang hasil tambang, mineral, batu bara, dan barang-barang mewah ke Korea Utara sesuai yang tercantum dalam *article 12* (MOFCOM, 2016; UNSCR 2017). Pemerintah Tiongkok juga melakukan pemeriksaan kargo barang-barang ekspor ke Korea Utara bersama DK-PBB dan memberlakukan pelarangan bepergian luar negeri beberapa warga negara Korea Utara sesuai yang tercantum dalam *article 18, Annex I dan IV* (RFA, 2016; UNSCR, 2017). Kemudian Tiongkok juga melakukan pelarangan pelayaran untuk kapal-kapal *vessel* (OMM) yang berkaitan dengan ekspor ke Korea Utara pada tanggal 8 Maret 2016. Hal ini dilakukan oleh Tiongkok sesuai yang tercantum dalam *Annex III* resolusi 2270 (Ju-Min, P dan Ruby Lane, 2016; UNSCR 2017). Kemudian Tiongkok juga melaporkan Bank Investasi yang berkaitan dengan perusahaan Liaoning Hongxiang Group asal Tiongkok di Singapura kepada DK-PBB dan membekukan aset tersebut pada tanggal 26 September 2016 sesuai yang tercantum dalam *Annex II* dua resolusi DK-PBB pada tahun tersebut (Reuters, 2016; UNSCR 2017).

Kemudian pasca pemberlakuan resolusi DK-PBB nomor 2356, 2371, 2375, dan 2397 tahun 2017, pemerintah Tiongkok melakukan pelarangan bepergian beberapa warga Korea Utara ke Tiongkok seperti yang tercantum dalam *Annex I* dari empat resolusi

tersebut yang di mulai pada tanggal 19 April 2017 (Meesak, 2017; UNSCR 2018). Tiongkok juga melakukan embargo bahan bakar minyak dan barang-barang mineral lainnya kepada Korea Utara sesuai dengan yang dicantumkan pada *article 8* dan *Annex II* di dalam ke empat resolusi tersebut di mulai pada tanggal 21 Agustus 2017. Embargo bahan bakar minyak tersebut menyebabkan harga minyak di Korea Utar meningkat dari 8.000 won menjadi 14.000 setiap liternya (mata uang Korea Utara) (UNSCR, 2019; Silberstein, 2019). Pemerintah Tiongkok melalui Kementerian Perdagangannya melakukan pembekuan aset seperti pembekuan aset di *Daedong Credit Bank* semua nasabah asal Korea Utara seperti yang tercantum dalam *article 12-14* dan *Annex II*. Bank tersebut merupakan salah satu bank investasi terbesar di Tiongkok dimana pembekuan aset tersebut di mulai pada tanggal 11 September 2017 (Yuan, Y dan Liu, 2017; UNSCR 2018). Lalu, Tiongkok juga melakukan pembekuan aset seperti perusahaan *Beijing Yuan Mansudae Art Studio* pada tanggal 28 September 2017 (Poornima, W. dan Yu, 2017; UNSCR 2018). Tidak hanya itu, Tiongkok juga melakukan pembekuan aset perusahaan *Shanghai Zhen Tai Instrument Corporation Limited* yang merupakan anak perusahaan dari *Namchogang Trading Corporation* pada 24 September 2017 (UNSCR, 2019).

Dari upaya-upaya Tiongkok yang telah diatas, jika dilihat dari hanya atas kepentingan stabilitas keamanan dan perdamaian regional wilayah Asia akan terlihat bias dan juga jika dikatakan perubahan kebijakan tersebut atas dasar kepentingan ekonomi dapat dikatakan kontradiktif dikarenakan Tiongkok melakukan pemberhentian ekspor, pembekuan aset, dan pelarangan penerimaan turis (*travel ban*) yang seharusnya dapat merugikan pertumbuhan ekonomi Tiongkok namun hal tersebut justru berbanding terbalik hal ini dapat dilihat dari gambar di bawah:

Gambar 2. Gambar Grafik Peningkatan GDP Tiongkok



Sumber: World Bank, 2022

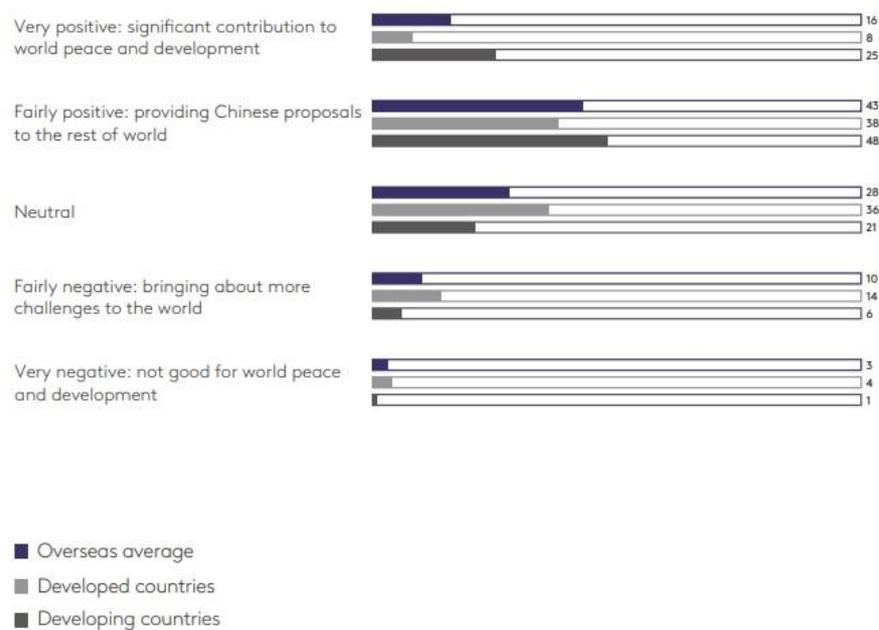
Di dalam grafik tersebut Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi dimulai 8.532 \$ Triliun USD pada tahun 2012 hingga 13.895 \$ Triliun USD di tahun 2018 dalam hal ini dalam kurun waktu tersebut Tiongkok berhasil mencapai peningkatan *annual GDP* sebesar 5.363 \$ Triliun USD (World Bank, 2022). Dari peningkatan perkembangan ekonomi Tiongkok, tindakan upaya denuklirisasi Korea Utara tidak dapat dipandang melalui satu sudut pandang. Seperti halnya yang dikatakan oleh Konfusius bahwasannya

esensi dari segalanya adalah perdamaian dunia atau *harmoni (Da Tong)* seraya mengejar kepentingan lainnya.

Keterkaitan diantara perubahan kebijakan Tiongkok terhadap Korea Utara serta upayanya dalam proses denuklirasi hingga peningkatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dapat dilihat dari pembentukan citra atas reputasi kebijakan luar negeri Tiongkok sebagai negara yang cinta damai. Seperti yang jelaskan oleh Qin Yaqing (2012) mengenai empat elemen perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok yakni *contextuality, correlativity complementarity, dan changeability* dimana pada isu ini elemen *Correlativity* yang merupakan nilai dari norma (*gianxi* dan *mianzi*) atau dapat diartikan sebagai pencarian harga diri dan timbal balik atas tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok lebih menonjol dibandingkan tiga elemen lainnya.

Gambaran persepsi citra kebijakan luar negeri Tiongkok di kancah komunitas internasional pula dapat dilihat melalui gambar di bawah ini:

Gambar 3. Reputasi Kebijakan Luar Negeri Tiongkok

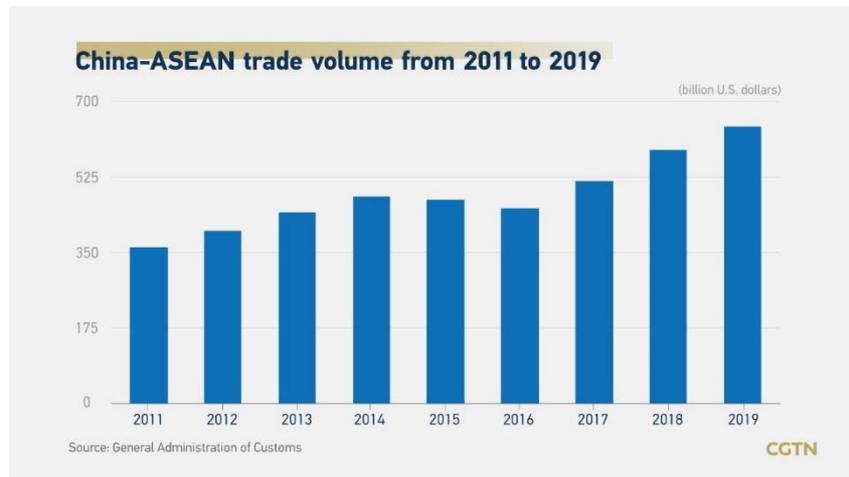


Samples: 8,865 overseas knowing China's 40 years of reform and opening up

Sumber: (Kantar, 2018, hal. 15-16)

Dari hasil survei diatas dapat diketahui bahwa rata – rata baik responden dari masyarakat negara berkembang, negara maju, maupun responden secara acak (*random sampling*) 59% menyatakan bahwa Tiongkok memiliki peran positif dalam kontribusi perdamaian dunia dan 76% dari responden yang menyatakan hal tersebut merupakan responden dari negara berkembang (Kantar, 2018 hal. 16). Dalam artian, citra Tiongkok sebagai negara yang cinta damai lebih dominan di pandang oleh masyarakat negara berkembang dibandingkan negara maju. Hal ini dapat dikaitkan dengan pertumbuhan kerjasama luar negeri Tiongkok dengan negara-negara berkembang seperti negara-negara anggota ASEAN seperti yang dapat dilihat melalui gambar dibawah ini:

Gambar 4. Grafik Pertumbuhan Kerjasama Tiongkok-ASEAN



Sumber: CGTN, 2020

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa pasca perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap Korea Utara di mulai dari tahun 2013 hingga 2019 Tiongkok mengalami peningkatan volume dari kurang lebih \$292.8-\$641.5 miliar USD. Dalam hal ini dapat dilihat pula terjadinya peningkatan kerjasama diantara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN (CGTN, 2020).

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa eksistensi Tiongkok sebagai negara yang cinta perdamaian dapat digunakan oleh Tiongkok sebagai *bargaining position* negaranya di kancah internasional. Sehingga, perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok dapat dilihat didasari atas pembentukan identitas Tiongkok sebagai negara yang cinta damai yang dipengaruhi oleh norma Konfusianisme. Dimana elemen *correlativiy* lebih menonjol sehingga berdampak pada reputasi kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap negara berkembang yang terimplementasikan kedalam peningkatan kerjasama ekonomi dengan negara-negara berkembang seperti ASEAN. Seperti halnya yang dikatakan oleh Konfusianisme esensi dari segalanya adalah perdamaian dunia atau *harmoni* seraya mengejar kepentingan lainnya. (Bell, 2010, hal. 42). Dalam artian kepentingan atas menciptakan harmoni ingin dicapai oleh Tiongkok dengan merubah kebijakan luar negerinya terhadap Korea Utara dengan memberlakukan resolusi DK-PBB seraya mengejar kepentingan lainnya seperti kepentingan peningkatan kerjasama luar negeri di wilayah negara berkembang yang nanti nya akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi negara nya.

KESIMPULAN

Perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok ini didasari atas pembentukan identitas sebagai negara yang cinta damai di mana identitas tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai dari ajaran filsafat Konfusianisme yang menyatakan bahwa esensi dari segalanya adalah untuk mencapai *harmoni* atau *da tong* seraya mengejar kepentingan lainnya. Hal ini dapat dimaknai bahwa Tiongkok memiliki kewajiban untuk menjaga maupun menciptakan perdamaian dunia. Dalam isu denuklirisasi Korea Utara dapat dimaknai bahwa Tiongkok ingin mencapai stabilitas keamanan dan perdamaian khususnya di wilayah regional Asia dan juga perdamaian dunia. Hal tersebut dilakukan dengan mengimplementasikan resolusi-resolusi sanksi ekonomi DK-PBB kepada Korea Utara

yang dimulai dari tahun 2013 hingga 2017 dimana pada kurun lima tahun tersebut terdapat 8 resolusi yakni resolusi nomor 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017), dan 2397 (2017). Resolusi-resolusi tersebut diantaranya mengenai larangan perjalanan luar negeri (*travel ban*) bagi beberapa orang Korea Utara yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan nuklir di Korea Utara, lalu pembekuan aset luar negeri Korea Utara, pelarangan ekspor barang-barang yang dianggap berkaitan dalam pembangunan nuklir di Korea Utara seperti hasil tambang, *food production*, peralatan militer (kapal, pesawat dan lain-lain), industri mesin, teknologi terbaru dan juga barang-barang mewah seperti perhiasan dan kendaraan. Tidak hanya itu, Tiongkok juga mengedepankan peran diplomasi jalur damai melalui dialogue-dialogue bilateral maupun multilateral seperti *US-China Strategic Security Dialogue*, pertemuan bilateral dengan Korea Utara di Dahlian, dan publikasi *white paper* yang menjadi landasan kebijakan luar negeri Tiongkok terkait isu denuklirisasi Korea Utara.

Dari upaya-upaya untuk mencapai denuklirisasi Korea Utara ini menciptakan suatu gambaran persepsi atas citra kebijakan luar negeri Tiongkok yang mengedepankan perdamaian sehingga hal tersebut memfasilitasi persepsi kepada komunitas internasional khususnya negara-negara berkembang untuk meningkatkan kerjasama luar negeri dengan Tiongkok seperti dalam bidang ekonomi. Hal tersebut merupakan dominansi dari elemen *Correlativity* yang merupakan timbal balik atas eksistensi perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap Korea Utara dalam isu denuklirisasi yang berkesan bahwa Tiongkok merupakan negara yang cinta akan perdamaian. Sehingga, kepentingan utama dari perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok dalam isu denuklirisasi Korea Utara dapat dimaknai sebagai upaya Tiongkok dalam menjaga stabilitas dan keamanan regional negara wilayah Asia dan timbal balik atas tindakan tersebut secara tidak langsung memfasilitasi kepentingan lainnya seperti pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini hanya berfokus mengenai salah satu faktor domestik Tiongkok sehingga hanya dapat terlihat pengaruh dari nilai ajaran filsafat Konfusianisme saja sehingga peneliti menyarankan dalam penelitian selanjutnya untuk membahas mengenai faktor internal lainnya seperti Daoisme, Taoisme dan lain sebagainya sehingga dapat dilihat faktor internal lainnya yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok dalam isu ini. Lalu, teknik analisis data yang menggunakan Kongruen dalam membuktikan Konfusianisme memiliki pengaruh dalam perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok dalam isu denuklirisasi ini sehingga harus adanya penelitian selanjutnya secara spesifik mengenai ke-efektifan dari pengaruh Konfusianisme dalam perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap Korea Utara dalam isu terkait.

Adapun rekomendasi dalam melihat strategi kebijakan luar negeri Tiongkok yang dapat diadopsi oleh pemerintah Indonesia dengan cara mengedepankan salah satu instrumen diplomasi *soft power* untuk meningkatkan citra negara Indonesia di kancah komunitas Internasional dengan mempromosikan nilai-nilai ajaran budaya Indonesia seperti Pancasila yang merupakan identitas asli Indonesia. Seperti halnya Tiongkok, pemerintah Indonesia dapat pula memulai hal tersebut dengan melakukan pendirian Pancasila Institute di luar negeri.

REFERENSI

- Babones, S. (2016, 14 Januari). *Right Concept, Wrong Country: Tianming and Tianxia in International Relations*. Dalam: <http://www.asianreviewofbooks.com/pages/?ID=2500>. Diunduh pada 10 Januari 2019 pukul 10.00 WIB.
- BBC. (2013, 24 September). *China bans several weapon-related North Korea exports*. Dalam <https://www.bbc.com/news/world-asia-24216993>. Diunduh pada 28 Februari 2022 pukul 20.00 WIB.
- BBC. (2016, 5 April). *China restricts North Korea trade over nuclear tests*. Dalam: <https://www.bbc.com/news/world-asia-35969412>. Diunduh pada 10 Januari 2019 pukul 10.28 WIB.
- Bell, D. A. (2010). *China's New Confucism: Politics and Everyday Life in a Changing Society*. New Jersey: Princeton University Press.
- Bennett, B. W. (2016). Preparing for the Possibility of a North Korean Collapse. Dalam B. W. Bennett, *Preparing for the Possibility of a North Korean Collapse*. RAND Corporation: hal. 259-280
- Blanchard, B. (2013, 1 Mei). *China steps up customs checks, but North Korea trade robust*. Dalam <https://www.reuters.com/article/us-korea-north-sanctions-china-idUSBRE93T15E20130430>. Diunduh pada 28 Februari 2018.
- Browning, V.-C., dan Friedrich, D. S. (2017). The United Nation and North Korea: A Balancing Act between Sanction and Humanitarian Assistance. Jurnal: *Konrad Adenauer Stiftung, IV*(1). Hal. 1-11.
- Burchill, Scott. (2005). *Theories of International Relations*. New York: Palgrave McMillan.
- CGTN. (2020, 11 November). Xi Jinping calls for elevated China-ASEAN cooperation for regional economic recovery. Dalam <https://english.cctv.com/2020/11/27/ARTIN7kJsZJWSirth6Hrse3201127.shtml>. Diunduh pada 28 Februari 2022 pukul 19.34 WIB.
- FMPRC. (2013, 16 Desember). *Embark on a New Journey of China's Diplomacy Address by Foreign Minister Wang Yi at the Symposium "New Starting Point, New Thinking and New Practice 2013: China and the World"*. Dalam: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t1109943.shtml. Diunduh pada 10 Januari 2019 pukul 10.28 WIB.
- FMPRC. (2015, 14 April). *China-US: Duel of the Century or Partner of the Century?*. Dalam: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/zwbj_665378/t1254993.shtml. Diunduh pada 5 Maret 2019 pukul 11.28 WIB.
- FMPRC. (2017, 29 April). *Stay Committed to the Goal of Denuclearization Uphold Peace and Stability on the Peninsula*. Dalam: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t1458508.shtml. Diunduh pada 10 Maret 2019 pukul 12.00 WIB.
- FMPRC. (2018, 8 Mei). *Xi Jinping Holds Meeting with Chairman of the WPK Kim Jong-un of the DPRK in Dalian*. Dalam: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zjzg_663340/yzs_663350/gjlb_663354/2701_663406/2703_663410/t1558201.shtml. Diunduh pada 12 Maret 2019 pukul 12.00 WIB.
- Garver, J. W. (2001). The Restoration of Sino-Indian Comity following India's Nuclear Tests. Jurnal: *The China Quarterly*. Hal. 1-25.

- George, A. L. dan Bennett, A. (2005). The Congruence Method. Dalam A. L. George dan A. Bennett, *Case Studies And Theory Development in the Social Sciences*. London: MIT Press.
- Jepperson, R. L., Wendt, A., dan Katzenstein, P. J. (1996). Norms, Identity, and Culture in National Security. Dalam P. J. Katzenstein, *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*. New York: Columbia University Press: hal. 28-64
- Ju-min Park dan Ruby Lian. (2016, 8 Maret). *China, South Korea step up sanctions on North Korea*. Dalam <https://www.reuters.com/article/us-northkorea-nuclear-sanctions-idUSKCN0WA14U>. Diunduh pada 28 Februari 2022 pukul 20.00 WIB.
- Kantar. (2018). China National Image Global Survey. Jurnal: *China Foreign Languages Publishing Administration*. Hal. 1-24.
- Katzenstein, P. J. (1996). Introduction: Alternative Perspectives on National Security. Dalam P. J. Katzenstein, *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*. New York: Columbia University Press: hal. 1-27.
- Lee, H. (2014). Rising China and the Evolution of China-North Korea Relations. Jurnal: *The Korean Journal of International Studies*. Hal. 99-107.
- Lee, H. (2014). Rising China and the Evolution of China-North Korea Relations. Jurnal: *The Korean Journal of International Studies*. Hal. 99-107.
- Li, C. (2006). The Confucian Ideal of Harmony. Jurnal: *Philosophy East and West*. Hal. 583-603.
- Lynch, C. (2016, 7 Maret). *U.N. Panel: North Korea Used Chinese Bank to Evade Nuclear Sanctions*. Dalam <https://foreignpolicy.com/2016/03/07/u-n-panel-north-korea-used-chinese-bank-to-evade-nuclear-sanctions/>. Diunduh pada 28 Februari 2022 pukul 21.00 WIB.
- McArthur, M. (2011). *Confucianism*. Quercus.
- Meesak, Daniel. (2017, 19 April). China Limits Travel to Both Koreas as Conflict Heats Up. Dalam <https://jingdaily.com/china-limits-travel-to-both-koreas-as-conflict-heats-up/>. Diunduh pada 28 Februari 2022 pukul 20.00 WIB.
- MOFCOM. (2016, 7 April). *MOFCOM Announcement No. 11 of 2016 Announcement on List of Mineral Products Embargo against the DPRK*. Dalam: <http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/buwei/201604/20160401291199.shtml>. Diunduh pada 28 Februari 2022 pukul 20.00 WIB.
- Nam, C. (2010). The Establishment and Characteristics of PRC-DPRK Alliance. Dalam C. Nam, A. L. Miller, dan M. Chakwin, *Beijing and the 1961 PRC-DPRK security treaty*. California: Naval Postgraduate School: hal. 13-25.
- Neuman, W. Lawrence. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Edinburgh: Pearson.
- New York Times. (2013, 24 September). *China Bans Items for Export to North Korea, Fearing Their Use in Weapons*. Dalam: <https://www.nytimes.com/2013/09/25/world/asia/china-bans-certain-north-korean-exports-for-fear-of-weapons-use.html>. Diunduh pada 9 Agustus 2019 pukul 12.00 WIB.
- Poornima, W. dan Yu. (2017, 27 Oktober). *North Korean Businesses in China Start Countdown as Deadline for Closure Looms*. Dalam <https://www.caixinglobal.com/2017-10-27/north-korean-businesses-in-china->

- start-countdown-as-deadline-for-closure-looms-101162227.html*. Diunduh pada 28 Februari 2022 pukul 19.20 WIB.
- Rabinovitch, S., dan Mundy, S. (2013, 8 Mei). *China reduces banking lifeline to North Korea*. Dalam <https://edition.cnn.com/2013/05/08/business/china-north-korea-banking/index.html>. Diunduh pada 28 Februari 2022 pukul 18.00 WIB.
- Radio Free Asia (2013, 12 April). *Chinese local authorities block travel to North Korea*. Dalam <https://www.refworld.org/docid/5190dcc018.html>. Diunduh pada 28 Februari 2022 pukul 12.00 WIB.
- Radio Free Asia (2016, 14 April). *Chinese Customs Officials Step Up Inspections of Cargo Headed for North Korea*. Dalam <https://www.rfa.org/english/news/korea/chinese-customs-officials-step-up-inspections-of-cargo-headed-for-north-korea-04142016134023.html>. Diunduh pada 28 Februari 2022 pukul 12.30 WIB.
- Reuters. (2016, 26 September). *China probes North Korea bank suspected of nuclear link - South Korea paper*. Dalam <https://www.reuters.com/article/us-northkorea-nuclear-bank-idUSKCN11W049>. Diunduh pada 28 Februari 2022 pukul 17.00 WIB.
- Rosyidin, M. (2012). Mengapa tidak berperang? Norma Politik Luar Negeri Cina dan Konflik Laut Cina Selatan. *Jurnal: Andalas Journal of International Studies*. Hal. 137 - 151.
- SCPRC. (2017, 11 Januari). *White Papers: China's Policies on Asia-Pacific Security Cooperation*. Dalam: http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2017/01/11/content_281475539078636.htm. Diunduh pada 17 Agustus 2019 pukul 12.00 WIB.
- Silberstein, B. K. (2019, 1 Februari). *China's Sanctions Enforcement and Fuel Prices in North Korea: What the Data Tells Us*. Dalam: <https://www.38north.org/2019/02/bkatzeffsilberstein020119/>. Diunduh pada 17 Agustus 2019 pukul 12.00 WIB.
- Song, J. (2011). Understanding China's Response to North Korea's Provocations: The Dual Threats Model. *Jurnal: Asian Survey*. Hal. 1134-1155.
- UNSCR. (2006, 14 Oktober). *Security Council Condemns Nuclear Test by Democratic People's of Korea, Unanimously Adopting Resolution 1718*. Dalam: <https://www.un.org/press/en/2006/sc8853.doc.htm>. Diunduh pada 20 September 2019 pukul 12.00 WIB.
- UNSCR. (2014, 6 Maret). *the final report of the Panel of Experts assisting the 1718 DPRK Sanctions Committee*. Dalam http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_147.pdf. Diunduh pada 28 Februari 2022 pukul 19.03 WIB.
- UNSCR. (2015, 27 Maret). *the report of the Panel of Experts assisting the 1718 DPRK Sanctions Committee*. Dalam http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_131.pdf. Diunduh pada 28 Februari pukul 19.06 WIB.
- UNSCR. (2015, 27 Maret). *the report of the Panel of Experts assisting the 1718 DPRK Sanctions Committee*. Dalam [108](http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-</p>
</div>
<div data-bbox=)

- 8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_131.pdf. Diunduh pada 28 Februari pukul 19.06 WIB.
- UNSCR. (2017, 27 Februari). *the Panel of Experts' final report under resolution 2276*. Dalam http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2017_150.pdf. Diunduh pada 28 Februari 2022 pukul 19.10 WIB.
- UNSCR. (2018, 5 Maret). *the final report of the Panel of Experts which included its findings and recommendations for the Council*. Dalam http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2018_171.pdf. Diunduh pada 28 Februari 2022 pukul 19.20 WIB.
- UNSCR. (2019, 5 Maret). *the final report of the Panel of Experts of the 1718 DPRK Sanctions Committee*. Dalam https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2019_171.pdf. Diunduh pada 28 Februari 2022 pukul 19.30 WIB.
- UNSCR. (2019, 5 Maret). *the final report of the Panel of Experts of the 1718 DPRK Sanctions Committee*. Dalam https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2019_171.pdf. Diunduh pada 28 Februari 2022 pukul 19.30 WIB.
- World Bank. (2022, 28 Februari). *GDP (current US\$)-China*. Dalam <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?contextual=default&end=2018&locations=CN&start=2012&view=chart>. Diunduh pada 28 Februari 2022 pukul 19.28 WIB.
- Yaqing, Q. (2012, 12 April). *Chinese Culture and Its Implications for Foreign Policy Making*. Dalam: http://www.ciis.org.cn/english/2012-04/12/content_4934865.htm. Diunduh pada 20 September 2019 pukul 12.00 WIB.
- Yuan, Y dan Liu, X (2017, 11 September). *China's biggest banks ban new North Korean accounts*. Dalam <https://www.ft.com/content/893cab44-96c5-11e7-a652-cde3f882dd7b>. Diunduh pada 28 Februari 2022 pukul 19.18 WIB